

**ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN**
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Skripsi

**(Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Hukum)**

Oleh :

ASEP RIADI

NPM.1521010047

Jurusan : Ahwal Al-Syaksiyyah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/ 2019 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN**
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Skripsi

**(Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syari'ah)**



Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

Pembimbing II : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batas minimal usia perkawinan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun hal tersebut menimbulkan polemik karena bunyi pasal tersebut dianggap bersifat diskriminatif terutama bagi kalangan perempuan. Oleh karena itu para pemohon yaitu Ibu Eendang Warsiah, Ibu Maryanti, dan Ibu Rasminah mengajukan permohonan uji materil ke MK, Hakim MK mengabulkan dengan mengeluarkan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

Permasalahan dalam penelitian ini ialah yang pertama, bagaimana batas minimal usia perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kedua, bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, dan yang ketiga bagaimana analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk lebih memahami batas minimal usia perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pembatalan Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan yang bersifat *yuridis-normatif*. Pengolahan data melalui *editing*, *coding*, dan rekonstruksi data. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, yang pertama, batas minimal usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Peraturan tersebut dianggap tidak relevan lagi karena bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan UU Perlindungan Anak, serta akan berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi dan kesehatan pihak yang bersangkutan. Kedua, Hakim MK menyatakan dalam pertimbangannya pada Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 bahwasanya pasal tersebut telah menimbulkan diskriminasi atas dasar *gender* yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak asasi khususnya pada anak perempuan sebagai bagian HAM yang dijamin UUD RI Tahun 1945. MK lebih memperjuangkan HAM dengan menyatakan Pasal 7 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta menyatakan kepada pembuat UU agar isi Pasal *a quo* untuk segera dirubah dalam tempo 3 tahun atau jika lewat maka disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketiga, dipandang dari segi kemashlahatan di atas, Hukum Islam lebih mengedepankan pada kemashlahatan yang lebih besar yaitu pada Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak asasi anak, hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah: **جَلْبُ الْمُنْفَعَةِ وَدَفْعُ الْمَفْسَدَةِ** (menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan) serta sesuai dengan konstitusi di Indonesia.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukansecukupnya, maka skripsi saudari:

Nama : Asep Riadi

NPM : 1521010047

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah


**Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN (Studi
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-
XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan)**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Efa Rodia Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002


Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.H.
NIP. 195703051978031001

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah**


H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)**, disusun oleh **Asep Riadi, NPM. 1521010047**, Program Studi **al-Ahwal al-Syakhsiyyah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 23 September 2019**.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag (.....)

Sekretaris : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I (.....)

Penguji Utama : Drs. H. Irwantoni, M. Hum (.....)

Penguji Pendamping I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H (.....)

Penguji Pendamping II : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, M.M (.....)

**Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**



**Mhoiruddin, M.H
NIP. 196210221993031002**

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Q.S.An-Nur:32).¹



¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahnya)*, (Bandung: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 354.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin. Dengan segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan saya kekuatan, serta atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta yaitu Bapak dan Ibu (Samsu Rizal dan Saryana) sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tidak terhingga aku persembahkan karya kecil ini untuk Bapak dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tidak terhingga yang tidak mungkin aku bisa membalasnya. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia.
2. Kakak-kakakku tersayang (Samsul Irawan, Liana Sari, Nia Anita, Rido Sukri, Kausar Ali), terimakasih atas doa dan bantuan kalian selama ini.
3. Para Dosen, Ustadz, dan Guru yang telah ikhlas mengajarkan ilmu-ilmu Agama dan umum kepada saya agar menjadi pribadi yang baik.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Asep Riadi. Dilahirkan pada tanggal 04 September 1995 di Gunung Sari, Biha. Putra ketujuh dari tujuh bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Samsu Rizal dan Ibu Saryana.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar di SDN 02 Biha, Pesisir Barat, pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 02 Biha, tamat pada tahun 2012. Melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di SMAS IT Yamama, Kemiling, tamat pada tahun 2015. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi, di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puja dan puji bagi Allah swt, Rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah swt. yang masih mencurahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Terhadap Pembatalan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad saw, para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat kelak.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Dr.H Khoiruddin Tahmid, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta para wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
3. H. Rohmat, S.Ag., M.H.I selaku Ketua Jurusan dan Bapak Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Raden Intan Lampung;
4. Ibu Dr. Efa Rodia Nur, M.H. selaku Pembimbing I, dan Bapak Drs. H.Ahmad Jalaluddin, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;

6. Ayah, Ibu, Kakak, serta sahabat-sahabat terimakasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua;
7. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan juga Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
8. Sahabat dan teman-temanku yang telah memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa (Hervianis Virnya Jaya, Aan Oktania Dewi, Eriska Permata Sari, Zefrian Nasir, Riza Andesta, Berli dan teman-teman seperjuangan di Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiah yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Seluruh rekan seperjuangan angkatan 2015 serta teman-teman AMPIBI, KKN 250 dan PPS kld dalam menuntut ilmu, dan juga rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syari'ah kakak serta adik-adik Ahwal al-Syakhsiiyyah khususnya;
10. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. *Jazakumullah*.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan dari keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi upaya penyempurnaan tulisan ini kedepannya.

Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman.

Bandar Lampung, 25 Agustus 2019

Penulis,

Asep Riadi

NPM. 1521010047

DAFTAR ISI

JUDUL	I
ABSTRAK	Ii
PERSETUJUAN	Iii
PENGESAHAN	Iv
MOTTO	V
PERSEMBAHAN	Vi
RIWAYAT	
HIDUP.....	Vii
KATA PENGANTAR	Viii
DAFTAR ISI	X
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam	13
1. Pengertian dan Dasar Hukum perkawinan	14
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	19
3. Prinsip-Prinsip dalam Perkawinan.....	23
4. Hakikat Perkawinan.....	24
5. Tujuan Perkawinan.....	24
6. Batas Usia Perkawinan.....	26
B. Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	31
1. Pengertian Menurut Hukum Positif.....	31
2. Prinsip-Prinsip Perkawinan.....	33
3. Hakikat Pernikahan.....	36
4. Tujuan Pernikahan.....	36
5. Batas Usia Pernikahan.....	37
BAB III UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN PUTUSAN	
 MAHKAMAH KONSTITUSI No. 22/PUU-XV/2017	
A. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	44
B. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.	
Tentang Uji Materil Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1	
Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	48
1. Duduk Perkara	48
2. Alasan-alasan Para Mengajukan Uji Materil Undang-	

Undang Perkawinan.....	52
3. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi.....	58
4. Amar Putusan.....	83

BAB IV ANALISIS DATA

A. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	92
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017	95
C. Analisis hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pembatalan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	103

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul: Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Oleh karena itu perlu diberikan penjelasan tentang apa yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Analisis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)²
2. Hukum Islam adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadanya di dalam hubungan dengan Tuhan, sesama muslim dan sesama manusia, serta hubungannya dengan alam dan kehidupan.³

² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h.145.

³ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Jogjakarta:Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990), h.1 .

3. Batas minimal adalah ketentuan yang tidak boleh dilampaui.⁴
4. Usia adalah umur⁵ atau dengan kata lain usia ialah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Semisal, umur manusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung.
5. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁶.
6. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, maka maksud dari judul ini adalah melakukan Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 145.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua Edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1539.

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Badruzzaman Siddik, *Perkembangan Peradilan di Indonesia (Sejak Zaman Kolonial Belanda Sampai Sekarang)*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 18.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan saya memilih dan menetapkan judul ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Pentingnya meneliti/menulis masalah yang akan diteliti terkait dengan judul di proposal, hal ini dikarenakan peneliti ingin menjelaskan tentang alasan hakim dapat memutuskan batas minimal usia perkawinan karena terkait judul tersebut melihat dari sudut pandang hukum Islam tentang batas minimal usia perkawinan.

2. Alasan Subjektif

Banyak referensi pendukung dari skripsi yang akan diteliti ini sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini kedepannya. Selain itu judul yang penulis ajukan sesuai dengan jurusan yang saya ambil di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Kesejahteraan masyarakat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Adapun keluarga ini terbentuk melalui sebuah perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁸

Perkawinan merupakan perintah agama. Sebagaimana Allah SWT berfirman didalam al-Quran surah An-Nisaa' ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat aniaya.”⁹

Khusus untuk perempuan usia perkawinan, secara tegas tidak disebutkan dalam al-Quran maupun Hadist Nabi sehingga anak perempuan pada usia yang belum memahami arti berumah tangga ketika dinikahkan, maka nikahnya adalah sah. Namun para ulama modern perlu memberikan batas minimal usia perkawinan dengan alasan untuk kemaslahatan bagi pasangan suami istri. Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dikalangan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tergantung pada kesejahteraan keluarga. Adapun keluarga ini terbentuk melalui sebuah perkawinan.

⁸Republik Indonesia Undang-undang Perkawinan, Cetakan: I (Bandung: Focus Media, 2005), 1.

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahnya)*, (Bandung: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 77.

Hukum perkawinan di Indonesia yang menetapkan bahwa batas minimal usia perkawinan di Indonesia sejatinya adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Bagi mereka yang tidak mencapai usia ini maka harus meminta izin dari pengadilan, dan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun maka harus menyertakan izin dari orang tua.¹⁰

Membina rumah tangga bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu mengingat besarnya tanggung jawab dalam mengarungi sebuah rumah tangga harus dibutuhkan persiapan kematangan baik mental maupun fisik kedua calon mempelai. Namun menurut para pemohon terdapat diskriminasi mengenai batas usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Yang terdapat Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Ada beberapa alasan yang diutarakan oleh para pemohon kepada Mahkamah Konstitusi antara lain sebagai berikut.

1. Dari perbedaan kedudukan hukum ini mengakibatkan anak perempuan kawin pada usia dibawah 18 tahun, secara otomatis dia tidak lagi dianggap seorang anak, sehingga hak-hak anak yang seharusnya melekat pada dirinya menjadi terampas. Tindakan pengistimewaan berdasarkan gender diberikan pada anak laki-laki yang terjamin hak-hak anaknya karena

¹⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cetakan Pertama. (jakarta : Sinar Grafika, 2013) h. 202.

ketentuan usia perkawinan 19 tahun pada pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.

2. Pernikahan diusia muda akan berdampak lebih besar pada pihak perempuan, baik dari aspek kesehatan fisik maupun psikologis. Sistem reproduksi perempuan di bawah 20 tahun masih belum siap untuk memiliki anak. Inilah salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu di Indonesia.
3. Menikah muda juga jelas akan mengganggu pendidikan, apalagi kalau sampai terjadi kehamilan. Karena umumnya, sekolah tidak mau menerima siswi yang sedang hamil. Akibatnya, pihak perempuan akan putus sekolah dan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak.
4. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menjadi dampak lain yang harus diwaspadai. Karena faktanya, Tahun 2017 tercatat 348.446 kasus, melonjak jauh dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 259.150 kasus. Sebagian besar data tersebut bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR).¹¹

Masih banyak lagi resiko lain yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan dimasa muda. Indonesia termasuk negara yang cukup menoleransi perkawinan muda. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan dari negara-negara lain dalam pembatasan usia nikah. Negara yang menerapkan usia 21 bagi laki-laki adalah Aljazair dan Bangladesh, serta 18 tahun bagi perempuan. Sementara

¹¹Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Online), Tersedia di: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/kekerasan-perempuan-meningkat-71-persen-kasus-inses-terbanyak/full> (15 Juli 2019).

Tunisia sama dengan Indonesia 19 tahun bagi laki-laki, hanya saja Tunisia membatasi 17 tahun bagi perempuan. Yang cukup banyak adalah usia 18 tahun bagi laki-laki, yaitu Mesir, Irak, Lebanon, Libya, Maroko, Pakistan, Somalia, Yaman selatan, dan Suriah. Sisanya adalah usia dibawah 18 tahun, yakni Turki yang mematok umur 17 tahun untuk laki-laki, Yordania 17 tahun dan yang paling rendah adalah Yaman Utara 15 tahun bagi perempuan. Sementara untuk usia perempuan yang tertinggi adalah 18 tahun, yang diterapkan di Aljazair, dan Libanon, sedangkan yang sama dengan Indonesia 16 tahun untuk perempuan adalah Yaman Selatan, Pakistan, Malaysia, Libya, dan Mesir.¹²

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, yang menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 tahun” Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sekalipun ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 merupakan kebijakan hukum yang deskriminatif terhadap perempuan namun tidak semata-merta Mahkamah Konstitusi dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan

¹²Tahir mahood, personal law in islamic countries, (New Delhy:Academy of Law and Religion, 1987), hal. 270; Dalam konvensi Tentang Hak-hak anak disebutkan bahwa seseorang dikategorikan sebagai anak-anak ketika usia dibawah 18 tahun. Lihat pasal Konvena. Komisi nasional hak asasi manusia, kompilasi instrumen HAM internasional (Jakarta: Komnas HAM, 2008), h. 133.

deskriminatif namun penentuan batas minimal usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk Undang-undang. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut masih tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang analisis hukum Islam terhadap batas minimal usia perkawinan (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Terhadap Pembatalan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk lebih memahami batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.
3. Untuk mengetahui lebih jelas bagaiman analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pembatalan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan data dan penafsiran fakta-fakta.¹³ Adapun metode dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.

informasi dengan bantuan berbagai buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

b. Sifat Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah *yuridis-normatif* yaitu penelitian yang pada awalnya dilakukan terhadap data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan, atau terhadap kenyataan yang ada dalam masyarakat.¹⁴

2. Pengumpulan Data

Penelitian *library research* menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentatif,¹⁵ dengan menelusuri kitab-kitab, buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik kajian, penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut diambil atau didapat dari sumber data primer, data sekunder, dan data tersier:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017, dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Sumber bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum ataupun risalah perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini ialah buku Hukum

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1981), h. 3.

¹⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), h. 75

Keluarga Indonesia karya Ahmad Tholabi Kharlie, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-zuhaili, dan lain sebagainya.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sedangkan sumber bahan hukum tersier dalam penelitian ini yakni berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnal-jurnal, dan lain-lain.

3. Pengelolaan Data

Secara umum pengelolaan data setelah data terkumpul dapat dilakukan :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu dari Al-Quran maupun Hadist, atau buku buku literatur lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.¹⁶

4. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan metode induktif yaitu cara analisis dari contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih

¹⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Balai Pustaka,2016), h.107

dahulu yang kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan.¹⁷ Dalam penelitian ini menarik kesimpulan dari putusan Mahkamah konstitusi yang menetapkan terhadap batas minimal usia perkawinan.



¹⁷ Pengertian metode induktif dan metode deduktif” (online), tersedia di : <https://makalah-update.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-metode.html>. (13 juli 2017 , pukul 12.15)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Islam memandang bahwa kawin atau nikah adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar di antara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya.

Firman Allah SWT dalam al-qur'an surah An-Nisa' ayat 21:



Artinya: “Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.” (An-Nisa’ ayat 21).¹⁸

Perkawinan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rohmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami dan istri.¹⁹

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahnya)*, (Bandung: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 81.

¹⁹ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, Cetakan pertama, (Bandar lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), h. 10.

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus.²⁰ Sebutan lain untuk perkawinan adalah *az-zawaj* yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.²¹

Secara syari'at berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, memeluk, mencium, memegang, dan lain sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga. Para ulama hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk nersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan laki-laki bersenang-senang dengan perempuan dengan tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.²²

Menurut mazhab Maliki, perkawinan adalah: “Aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita”. Dengan aqad tersebut seseorang akan terhindar dari perbuatan haram (zina). Menurut mazhab Syafi’i perkawinan adalah: “Aqad yang didalamnya

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cetakan Kesembilan, (Jakarta : Gemainsani, 2011), h. 39.

²¹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cetakan Kedua Puluh Lima, (Pustaka Progressif, Surabaya, 2002), h. 1461

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, *Op. Cit.*

terdapat lafazh perkawinan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur²³.

Adapun para ulama memerincikan makna lafal nikah ada empat macam. *Pertama*, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran antara suami dan istri dalam arti kias. *Kedua*, sebaliknya, nikah diartikan percampuran antara suami dan istri dalam arti yang sebenarnya dan akad berarti kias. *Ketiga*, nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). *Keempat*, nikah diartikan adh-dhamm (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilath* (percampuran). Makna percampuran bagian dari adh-dhamm (bergabung) karena adh-dhamm meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan yang lain; yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad.²⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.²⁵

²³ M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cetakan Kedua, (Siraja, Jakarta, 2006), h. 11.

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ketiga (Amzah, Jakarta, 2014), h. 38.

²⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Pertama (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 4.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan peristiwa yang sakral maka Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pentingnya sebuah perkawinan, hal ini terlihat dari banyak nya ayat Al-qur'an yang menjelaskan tentang hal ini di antaran nya adalah:

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 sebagai berikut :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat aniaya.”²⁶

Ayat ini memerintahkan kepada seorang laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain - lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat - syarat tertentu

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahnya)*, (Bandung: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 77.

Dan juga firman Allah dalam surat An-nur ayat (32) :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S.An-Nur:32).²⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Al-Rum: 21)²⁸

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Adz-Dzariat:49)²⁹

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahnya)*, (Bandung: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 354.

²⁸ Ibid, h. 406.

²⁹ Ibid, h. 522.

Artinya: "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." (QS. Yasin Ayat: 36)³⁰

Begitu banyak pula anjuran Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Di antaranya, seperti dalam hadis-hadis Nabi Muhammad saw dibawah ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : "Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikannya." *Muttafaq Alaihi*.³¹

Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصْلَى وَأَنَا مُمْ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النَّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: "Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." *Muttafaq Alaihi*³²

³⁰ Ibid, h. 442.

³¹ Ibnu Hajar Atsqalani, *Terjemah Bulughul-maram*, (Bandung, CV penerbit Diponegoro,1999) ,h .431.

³² . Ibid

Rasulullah SAW. Bersabda:

وَعَنْهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَبَّانَ

Artinya: “Dan daripadanya ia berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.” Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.³³

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan Syarat menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan dari segi hukum. Sehingga baik rukun dan syarat, keduanya harus dipenuhi, agar suatu perbuatan hukum dikatakan sah. Dalam ilmu Ushul Fiqih, syarat bermata dua yaitu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

³³ Ibnu Hajar Atsqalani, *Bulughul Maram: Min Adilatil Ahkam, Alih Bahasa, Masdar Helmy, Terjemahan Hadits Bulughul Maram*, Cetakan Ketiga, Hadist Nomor 996, CV Gema Risalah Press, Bandung, h. 326

Menurut Abu Hanifah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan *sighat*, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafi'iyyah melihat syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut *sighat*, wali, calon suami-istri dan juga *syuhud*. Berkenaan dengan rukunya, bagi mereka ada lima, calon suami-istri, wali, dua orang saksi, dan *sighat*.³⁴ Dalam hal hukum perkawinan, dalam menentukan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang mana perbedaan tersebut tidak disebut substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sepakat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan yaitu:³⁵

a. Calon Suami, syarat-syaratnya:

- 1) Islam
- 2) *Baligh* / dewasa
- 3) Laki-laki
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak dipaksa atau kemauan sendiri
- 6) Bukan mahram dari calon istri
- 7) Jelas orangnya

³⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. Cit.*, h. 17

³⁵ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 59

8) Tidak sedang menjalankan ihram³⁶

b. Calon Istri, syarat-syaratnya:

- 1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *iddah*;³⁷
- 2) Merdeka, atas kemauan sendiri;
- 3) Jelas orangnya;
- 4) *Akil baligh*
- 5) Tidak sedang berihram;
- 6) Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali Nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki;
- 2) *Baligh* / dewasa
- 3) Waras akalnya;
- 4) Mempunyai hak perwalian;
- 5) Tidak terdapat halangan perwaliannya;
- 6) Adil; dan
- 7) Tidak sedang *ihram*.

d. Saksi Nikah, syarat-syarat:

- 1) Minimal dua orang laki-laki;
- 2) *Baligh* / dewasa
- 3) Hadir dalam Ijab qabul

³⁶ Tihami dan Soharo Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h, 13

³⁷ *Ibid.*

- 4) Waras akalnya
- 5) Adil;
- 6) Dapat mendengar dan melihat;
- 7) Bebas, tidak dipaksa;
- 8) Tidak sedang mengerjakan ihram;
- 9) Memahami bahasa yang digunakan dalam ijab kabul.³⁸

e. *Ijab Qabul*, syarat-syarat:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 4) Antara *ijab* dan *qabul* bersambung
- 5) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang ihram haji atau umrah.³⁹
- 7) Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau walinya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Dalam melaksanakan *ijab qabul* kedua belah pihak berniat untuk melaksanakan *ijab qabul*, demikian perlu dikarenakan akad nikah adalah

³⁸ Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat*, Edisi Kedua, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 13-14.

³⁹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 63.

salah satu bentuk tundakan hukum bahkan sangat sakral, sehingga perlu adanya tindakan yang tulus dan ketulusan tentunya dapat terwujud dengan baik bila memang diniatkan sesuai apa yang menjadi hajatnya.

Para ahli fikih mensyaratkan hendaknya ucapan yang dipergunakan dalam akad nikah bersifat mautlak, tidak disertai dengan syarat-syarat tertentu atau perjanjian tertentu. Apabila syarat atau perjanjian itu bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan hakekat perkawinan dalam Islam maka syarat dan perjanjian tidak sah dan tidak perlu dilakukan.⁴⁰

3. Prinsip-prinsip dalam Perkawinan

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu :

- a. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranyanya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

⁴⁰ Dewani Romli, *Op. Cit*, h. 43.

- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selam-lamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.⁴¹

4. Hakikat Perkawinan

Sudah menjadi kodrat Tuhan, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama, untuk saling mengenal, mengamati, dan mencintai, bahkan mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan perkawinan.

Pada hakikatnya, perkawinan adalah rasa cinta kasih, kewajiban, pemenuhan hasrat seksual dan pelanjutan keturunan. Bagi Islam, rasa cinta kasih adalah rukun pertama sebuah perkawinan.⁴²

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.⁴³

5. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam

⁴¹ Hakikat Perkawinan Dalam Hukum Islam (Online), Tersedia di: <http://masroni-wardi.blogspot.com/2012/04/prinsip-prinsip-perkawinan-menurut.html>

⁴² Al-Thahir Al-Hadad, *Wanita Dalam Syari'at dan Masyarakat*, (Jakarta Pustaka Firdaus, , 1993), h. 59

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (UII Press, Yogyakarta, 2000), h. 14

rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan rasul-Nya, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁴⁴

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Soemijati, dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, disebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Dari rumusan tujuan perkawinan diatas, Filosofi Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faidah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut :

⁴⁴ Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta, CV. Al-Hidayah, 1964), h.

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluri hidup manusia.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Menurut istilah, nikah adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan, dimana antara keduanya bukan muhrim atau lebih tegasnya, pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.⁴⁵

6. Batas Usia Perkawinan

Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.

⁴⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), h. 1.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ketika akan mengawinkan anak perempuan maka wali mujbir untuk musyawarah dalam menikahkan putrinya, karna pendapat beliau didasari dari al-Qur'an dan hadits, yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَادَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya". (QS. an-Nisa" (4): 6).⁴⁶

Secara historis, batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi Saw., dengan Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim sebagai berikut:

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

Artinya: "Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menikahiku saat itu aku berusia enam tahun, dan Beliau membina rumah tangga denganku saat aku sembilan tahun." (HR. Muslim No. 1422).⁴⁷

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahnya)*, (Bandung: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 77.

⁴⁷ Abd al-Rahmân al-Jazîry, *Kitab al-Fiqh 'Alâ Madzhâhib al-Arba'ah*, h. 161.

serta sudah *ihtilam* (mimpi basah) bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun⁴⁸.

Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.⁴⁹ Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan *baligh*.

Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis)nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode *balighnya* berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh. Mulainya usia baligh antara seorang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya.⁵⁰

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria *baligh* ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sadd al-zari'ah* atau mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *mafsadah* (kerusakan).⁵¹ Contohnya sepasang

⁴⁸ Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah an Najah*, (Surabaya : Dar al 'Abidin, tt), h. 15-16

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid I*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Prenada Media, 2008), h. 394.

⁵⁰ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh, Jilid II*, (Jakarta : Departemen Agama, 1985), hlm. 3-4

⁵¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Keempat, (Jakarta : Rajawali Press, 2003), h. 78.

muda mudi yang memilih untuk segera menikah agar terhindar dari dosa berpacaran (maksiat) sebelum menikah.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa :

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْبُلُوغَ بِالسِّنِّ يَتَحَقَّقُ بِخَمْسٍ عَشْرَةٍ فِي الْغُلَامِ وَالْحَارِثَةِ

Artinya: “Dan berkata Syafi’iyyah dan Hanabilah anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun.⁵²

Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh sebagai berikut :

وَقَالَ الْحَنَفِيُّ ثَمَانُ عَشْرَةٍ فِي الْغُلَامِ وَسَبْعُ عَشْرَةٍ فِي الْحَارِثَةِ

Artinya: “Dan berkata Abu hanafiyyah anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.⁵³

Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan :

وَقَالَ الْإِمَامِيُّ خَمْسُ عَشْرَةٍ فِي الْغُلَامِ وَتِسْعُ فِي الْحَارِثَةِ

Artinya: “Dan berkata Imamiyyah anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.⁵⁴

Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama

⁵² Muhammad Jawad Mughniyyah, “*al Ahwal al Syakhsiyyah*” (On-Line), Tersedia di: <http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum.html> (15 Juli 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum *baligh*. Kedua, ia dianggap telah *baligh* karena telah memungkinkan untuk *haid* sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak *khiyar* baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.

Mengingat perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*miitsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan.⁵⁵

Berdasar penjelasan di atas hukum Islam dalam memandang batasa minimal usia perkawinan ialah *bâligh*, dalam pandangan para fukaha dapat disimpulkan tanda-tanda *bâligh* ada dua, yaitu *bi al-alâmât*; bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau keluar mani, sedangkan wanita ditandai dengan *haidh*. *Bi al-sin*: menurut Hanâfi, 18 tahun laki-laki dan 17 tahun perempuan. Mâliki, ditandai dengan tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Syâfi'i, 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Hanbali, 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan usia nikah ini terjadi disebabkan Alquran maupun al-Hadits tidak secara eksplisit menetapkan usia nikah. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan penerapan usia perkawinan di berbagai negara tergantung kepada mazhab fikih yang dianut dijadikan pedoman negara.

⁵⁵ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*, Cetakan ke-III, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), h. 1.

B. Perkawinan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) merumuskan bahwa ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami isteri. Hidup bersama suami isteri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami isteri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami isteri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia .

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁵⁶

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

⁵⁶ Republik Indonesia Undang-Undang Perkawinan, Cetakan I, (Bandung: Focus Media, 2005), h.1.

Apabila devinisi diatas kita telaah, maka terdapatlah Lima unsur di dalamnya:

1. Ikatan lahir bathin.
2. Antara seorang Pria seorang wanita.
3. Sebagai suami-istri.
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal,
5. Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam Lima Unsur diatas penulis akan mencoba memberikan penjelasan khusus, pada unsur yang pertama dan yang kedua sehingga akan jelas pemahamannya:

1. Ikatan lahir batin

Ikatan lahir batin adalah, bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau bathin saja,⁵⁷ akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-isteri, dengan kata lain hal itu disebut dengan hubungan formal, hubungan formal ini nyata baik bagi prihal mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga, sebaliknya suatu ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ikatan bathin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan bathin ini yang dapat dijadikan

⁵⁷ Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Cetakan 1, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), h.13.

dasar pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Dalam membina keluarga yang bahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami-istri atau calon suami-istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti yang disejajarkan oleh agama yang kita anut masing dalam negara yang berdasarkan Pancasila. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir akan tetapi juga menyangkut unsur bathiniah.

2. Antara seorang pria dan seorang wanita.

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat ditarik pertama-tama bahwa hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi misalnya antara seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan wanita ataupun antara seorang wadam dan wadam lainnya. Di samping itu kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa dalam unsur kedua ini terkandung asas monogami.

Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, akan tetapi juga mempunyai unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

2. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Ada beberapa prinsip perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu

benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan antara lain sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁵⁸
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila

⁵⁸ . http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm

dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan agama.⁵⁹

- d. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.⁶⁰
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk mungkin perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.

- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.⁶¹

3. Hakikat Perkawinan

Menurut Undang-Undang No. 1/1974 Pasal 1, hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.⁶² Jadi, hakikat perkawinan bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga ikatan batin antara pasangan yang sudah resmi sebagai suami dan isteri.

Sedangkan menurut KUHPerdata hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subyek-subyek yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan di antara mereka dan dengan adanya persetujuan tersebut mereka menjadi terikat.

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Dalam pasal (1) UU No. 1/1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Arkola, Surabaya, h. 5.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶³ Sedangkan dalam KUHPerdara tidak ada satu pasalpun yang secara jelas-jelas mencantumkan mengenai tujuan perkawinan itu. Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

5. Batas Usia Perkawinan

a. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan batasan umur perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pada usia tersebut, baik pria maupun wanita diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk melaksanakan perkawinan dengan segala permasalahannya.

Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga menentukan batas umur selain ketentuan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria.

⁶³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit*, h. 351.

Undang-undang perkawinan pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Jadi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun kalau akan melangsungkan perkawinan harus ada izin orang tua (Pasal 6 ayat (2) UU No 1-1974). Izin orang tua itu terbatas sampai batas umur telah mencapai umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Jika kedua calon mempelai tidak mempunyai orang tua lagi atau orang tua yang bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendak nya, misalnya karena penyakit kurang akal, sakit ingatan, dan lain lain. Maka izin dimaksud cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, kalau tidak ada juga maka izin diperoleh dari wali, atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai dalam garis ke atas selama mereka masih hidup (kakek, nenek dll.) yang dapat menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 3-4 UU no. 1-1974).

Andai kata terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalnya mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan belum mencapai umur 16 tahun bagi wanita, karna pergaulan bebas sehingga wanita sudah hamil sebelum perkawinan, apakah UU No.1 tahun 1974 masih dapat memberikan kemungkinan untuk menyimpang dari batas umur tersebut? Dalam keadaan darurat seperti itu boleh menyimpang

dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun dari pihak wanita (Pasal 7 ayat (2) UU No. 1-1974). Jika orang tua tidak ada lagi atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, dapat dilakukan oleh wali, atau orang yang memelihara atau keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ke atas (Pasal 7 ayat (3) UU No. 1-1974).⁶⁴

b. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 29 yang berbunyi:

“Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tidak boleh mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberi dispensasi).⁶⁵

Sedangkan batas kedewasaan seseorang berdasarkan KUHPerdata pada Pasal 330 yang berbunyi:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

Apabila kawin itu sudah di bubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam

⁶⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan ke-3, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), h. 48-49.

⁶⁵ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-41 (PT Balai Pustaka, 2017), h. 8.

keadaan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua,⁶⁶

Berdasarkan Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 66 bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku.

Salah satunya adalah tidak berlakunya ketentuan batas minimal usia perkawinan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang batas umur perkawinan.

Beberapa negara muslim berbeda pula dalam menentukan batasan usia minimal perkawinan. Perbedaan penetapan batas usia ini tidak lepas dari pengaruh lingkungan, geografis dan budaya pada masing-masing negara.

Apabila dibandingkan dengan batas usia calon mempelai di beberapa negara muslim, Indonesia secara definitif belum yang tertinggi tetapi juga tidak terendah. Berikut data komparatif yang dikemukakan Tahir mahmood.

⁶⁶ *Ibid*, h. 90.

Tabel 1.1

Perbandingan Batas Usia Nikah di Negara-negara Muslim

No	Negara	Batasan Umur	
		Laki-laki	Perempuan
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16
5	Iraq	18	18
6	Yordania	16	15
7	Lebanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Syria	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15

Sumber data: Didalam buku personal law in silamic countries (History, text, and comparative Analisis):⁶⁷

Batas perkawinan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa batas usia standar adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sementara dalam pasal lain ditetapkan

⁶⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan ke- 2 (jakarta, Rajawali pers, 2015), h. 61.

pula bahwa perkawinan dapat terlaksana ketika usia perkawinan kedua mempelai adalah 21 tahun. Pada dasarnya batasan usia perkawinan di Indonesia tidak konsisten. Di satu sisi, Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan ijin kedua orang tua, di sisi lain pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan ijin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu ijin pengadilan.⁶⁸

Meskipun masing-masing negara memiliki standar umur perkawinan yang berbeda, namun intinya prinsip kematangan dan kedewasaan sangat diperhatikan. Dengan demikian keabsahan perkawinan tidak semata-mata karena terpenuhinya rukun melainkan berkembang pada pemenuhan syarat-syarat perkawinan.

c. Batas Minimal Perkawinan Menurut BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (disingkat BKKBN) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan

⁶⁸ Achmd Asrori, Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4, Desember 2015, (Bandar Lampung: Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 821, tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363> (29 Juni 2019).

penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas, BKKBN menyelenggarakan fungsi:⁶⁹

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
4. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
5. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
6. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Selain fungsi di atas, BKKBN juga menyelenggarakan fungsi:⁷⁰

- a. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
- e. Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berpendapat mengenai masalah batas minimal usia

⁶⁹ Usia Perkawinan Ideal Menurut BKKBN (Online), Tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Kependudukan_dan_Keluarga_Berencana_Nasional, (9 Juli 2019).

⁷⁰ Usia Perkawinan Ideal Menurut BKKBN (Online), Tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Kependudukan_dan_Keluarga_Berencana_Nasional, (9 Juli 2019).

perkawinan dan memberikan batas yang ideal untuk calon pengantin untuk melaksanakan perkawinan adapun pendapat BKKBN sebagai berikut:

"Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak. Untuk itu, BKKBN memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk pria," ujar Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim Sukaryo Teguh Santoso saat acara temu media di Samarinda.⁷¹

Berdasarkan ilmu kesehatan, lanjutnya, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata.

Rekomendasi ini ditujukan demi untuk kebaikan masyarakat, agar pasangan yang baru menikah memiliki kesiapan matang dalam mengarungi rumah tangga, sehingga dalam keluarga juga tercipta hubungan yang berkualitas. Ia menuturkan dalam berumah tangga sekaligus menjaga keharmonisannya bukan suatu pekerjaan yang mudah, karena memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap adanya guncangan yang muncul, baik guncangan akibat ekonomi, masalah internal maupun eksternal.

⁷¹ *Ibid.*

"Setiap pasangan yang menikah juga harus mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah aspek biologis dengan memerhatikan kematangan umur dan kondisi fisiknya," ucap Teguh. Ia menjelaskan, perbincangan mengenai pernikahan dini dari segi normatif sudah berlangsung lama, namun seiring dengan perkembangan zaman sekarang, maka perbincangannya ada nuansa baru dalam mengaji dampak negatif pernikahan dini, misalnya dengan pendekatan psikologis.

Menurut Teguh, di balik pernikahan dini ada persoalan psikologis yang harus menjadi perhatian, yakni mengenai psikis dan mental dari kedua pasangan yang menikah, terutama bagi perempuan, karena menikah berkaitan dengan organ reproduksi yang matang untuk siap menjadi orang tua. "Banyak penyebab mengapa pernikahan dini terjadi, seperti karena alasan sosial yang takut dianggap tidak laku, alasan ekonomi yang pas-pasan, atau karena kehamilan di luar nikah. Pernikahan dini yang sering terjadi karena orang tua dengan kondisi ekonomi lemah, sehingga terpaksa menikahkan putrinya yang masih remaja."⁷²

⁷² *Ibid.*

BAB III
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI No. 22/PUU-XV/2017

A. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan adalah Undang-Undang yang mengatur tentang apa arti sebuah perkawinan, bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaananya itu dari yang bersangkutan.

Undang-Undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan

zaman. Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material.

b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.

c. Undang-Undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

d. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar

supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-Undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

Umur calon mempelai dalam undang-undang, Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam kompilasi pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang dilakukan Undang-Undang perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masuk jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik pampa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus di cegah adanya pekawinan suami istri yang masih dibawah umur.

Isi pasal di atas selanjutnya dijadikan rujukan dalam penentuan usia kawin pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

Terkait ketentuan ini, Indonesia merupakan negara yang ketentuan batas usia nikahnya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Sebab di antara negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim, beberapa di antaranya ada yang menjadikan pendapat-pendapat imam madzhab tentang batasan usia nikah (*baligh*) sebagai acuan. Seperti Afghanistan yang

mengikuti madzhab Hanafi, sehingga ketetapan usia nikah di negara tersebut adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Demikian pula Somalia yang juga mengikuti madzhab Hanafi. Ada pula negara yang dengan tegas memberikan sanksi pidana yang tegas apabila ketentuan batasan usia nikah tersebut dilanggar. Iran misalnya, memberikan hukuman penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun bagi orang yang bertindak mengawinkan seseorang yang masih di bawah usia minimum nikah.

Ini sama sekali berbeda dengan peraturan yang ada di negara kita, dimana seseorang tetap boleh menikah pada usia di bawah batas minimum. Meskipun batasan usia persyaratan perkawinan telah diatur, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak atau keadaan darurat, maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan. Hal ini sebagai perwujudan metode *sadd al-dzari'ah* dalam menggali hukum yang progresif untuk menghindari kemungkinan timbulnya madharat yang lebih besar lagi. Dalam praktiknya, fleksibilitas dalam perizinan menikah di bawah batasan usia tersebut dinamakan dispensasi kawin.

B. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/ PUU-XV/2017. Tentang Uji Materi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Duduk perkara

Permohonan mengenai uji materi Pasal 7 ayat 1 bertanggal 20 April 2017 yang diajukan oleh 3 (tiga) orang pemohon yaitu:

- a. Nama Endang Wasrinah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Gang Walet RT/RW 002/010, Desa Pabean Udik, Kecamatan

Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Sebagai Pemohon I

- b. Nama Maryanti, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Kembang Seri RT/RW 000/000, Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Sebagai Pemohon II
- c. Nama Rasminah, Pekerjaan Ibu rumah tangga Alamat Blok Karang Malang RT/RW 014/004, Desa Krimun, kecamatan losarang, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat. Sebagai Pemohon III

Dengan alasan pokok Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” adalah demi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya anak perempuan Indonesia, serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi mendapat laporan (surat permohonan) uji materi, maka mahkamah konstitusi melakukan pemeriksaan secara mendalam kebenaran yang sebenar-benarnya. Sesuai dengan pihak-pihak yang telah diatur dalam Undang-Undang. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan melakukan penelitian dan pemeriksaan, sebagaimana pertimbangan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Setelah Mahkamah Konstitusi mendapat laporan (surat permohonan) uji materi, maka Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan secara mendalam kebenaran yang sebenar-benarnya. Sesuai dengan pihak-pihak yang telah diatur dalam Undang-Undang. Selanjutnya

mahkamah konstitusi akan melakukan penelitian dan pemeriksaan, sebagaimana pertimbangan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi:

- a. Perubahan politik di Indonesia yang berujung pada amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
- b. Selanjutnya dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
- c. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Mahkamah

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

- d. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Artinya, apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat mengulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya;
- e. Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
- f. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut para Pemohon telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional

warga negara, khususnya para Pemohon, sehingga merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD RI Tahun 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini.

2. Alasan-alasan Pemohon Mengajukan Uji Materiil Undang-undang Perkawinan.

Pemohon mendalilkan norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bertentangan UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pembedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan berada di bawah ambang batas usia anak berdasarkan konvensi hak anak, di mana jika seorang anak perempuan telah dinikahkan di bawah usia 18 tahun secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Penetapan usia perkawinan dalam UU 1/1974 menunjukkan adanya ketidaksetaraan bagi laki-laki dan perempuan khususnya terkait kondisi jiwa dan raga;

Perbedaan ketentuan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 yang semata-mata didasari oleh alasan jenis

kelamin merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sangat nyata. Perbedaan perlakuan atas usia perkawinan ini justru semakin memperbesar jarak ketertinggalan kaum perempuan karena terampasnya hak-hak anak yang seharusnya melekat pada mereka.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan. Dengan demikian batas usia perkawinan bagi perempuan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu mencapai 16 tahun bagi perempuan masih terkategori sebagai anak menurut Undang-Undang perlindungan anak. Oleh karena itu perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang perlindungan anak adalah perkawinan anak.

Penetapan batas usia perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 semata-mata didasarkan pada aspek kesehatan, namun perkembangan dalam dunia medis perempuan yang telah dinikahkan saat berusia 16 tahun sangat rentan atas gangguan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi di antaranya kehamilan. Menurut data UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun. Berbeda halnya dengan laki-laki di mana batas usia perkawinannya

telah melewati batas usia anak-anak, sehingga hal ini menimbulkan diskriminasi di mana hanya laki-laki yang diperhatikan kesehatannya;

Bahwa pada dasarnya setiap orang berhak atas pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28C ayat (1) Amandemen ke dua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 , Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan diskriminasi negara dalam mendapatkan hak atas pendidikan, laki-laki mendapatkan kesempatan dan hak yang lebih besar. Perkawinan yang dilakukan terhadap anak perempuan yang masih dalam usia anak dan usia sekolah seringkali menyebabkan anak tersebut kehilangan haknya atas pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2015 hanya sebanyak 8,88% anak perempuan Indonesia yang dapat menyelesaikan

pendidikan hingga SMA, sedangkan sebanyak 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Perempuan yang menikah di bawah 18 tahun memiliki korelasi dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya. Perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung memiliki pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menikah setelah usia 18 tahun. Batas usia kawin bagi perempuan dan laki-laki jelas telah mengakibatkan perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak atas pendidikan;

Bahwa yang menjadi faktor utama terjadinya pernikahan pada usia anak bagi seorang perempuan adalah faktor ekonomi keluarga, posisi anak perempuan saat itu tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya untuk tidak dinikahkan oleh keluarganya. Dalam Pasal 6 ayat (1) UU 1/1974 disebutkan bahwa “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” sehingga dari ketentuan ini seharusnya calon mempelai, termasuk mempelai wanita memiliki hak untuk menyetujui pernikahannya tanpa tekanan dari pihak-pihak lain. Hal ini mengarah pada eksploitasi anak terutama eksploitasi seksual anak dan hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

Ketentuan batas usia bagi perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 membuka potensi seorang anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih tua, perkawinan dengan laki-laki yang lebih tua rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa beberapa negara telah menerapkan kesetaraan dalam batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yaitu bagi perempuan dan laki-laki sama-sama 18 tahun atau bahkan sama-sama berusia 19 tahun;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya termasuk di dalamnya perkara yang menguji pasal yang sama yaitu Perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa ketentuan terkait usia pada umumnya merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Mahkamah Konsitusi pada setiap putusan yang menyatakan ketentuan *open legal policy*, tidak dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi kecuali

produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable, tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.

Terkait sikap Mahkamah Konstitusi mengenai *open legal policy*, para Pemohon berpendapat bahwa meskipun ketentuan yang diuji yang bersifat *open legal policy* namun jika ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sudah seharusnya Mahkamah Konsitusi dapat memutusnya karena permasalahan tersebut bukan lagi persoalan kewenangan membentuk undang-undang, namun merupakan pelanggaran hak konsitusi. Sehingga meskipun penentuan batas usia perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan *open legal policy*, namun implikasi ditetapkannya usia 16 tahun bagi perempuan telah merugikan hak konsitusional, karena ketentuan tersebut telah menciptakan ketidakadilan dan perbedaan di mata hukum terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu, sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi melakukan intervensi untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional para Pemohon.

Untuk mendukung dalilnya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti p-1 sampai dengan bukti p-13 sebagai berikut;

- a. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Bukti P- 2: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bukti P- 3: Fotokopi Identitas para Pemohon;
- d. Bukti P- 4: Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014;
- e. Bukti P- 5: Fotokopi Penelitian Plan Internasional dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM tentang Praktik Pernikahan Dini di Indonesia di 8 Wilayah (Halaman 46);
- f. Bukti P- 6: Fotokopi Supriyadi Widodo Eddyono, Penanganan Kasus Eksploitasi Komersial Anak (ESKA) di Indonesia, (ICJR: 2016);
- g. Bukti P- 7: Fotokopi Jurnal Mahkamah Konstitusi: Mardian Wibowo, Menakar Konstitusionalitas; Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang, 6 April 2015;
- h. Bukti P- 8: Fotokopi Muji Kartika Rahayu, Menafsir Demokrasi Konstitusional- Pengertian, Rasionalitas dan Status Demokrasi Konstitusional Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945 menurut MK), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional: 2014, (Halaman 117);
- i. Bukti P- 9: Fotokopi Badan Pusat Statistik, Perkawinan Usia Anak di Indonesia (2013 dan 2015), (Badan Pusat Statistik: Jakarta), (Halaman 19-20);

- j. Bukti P- 10 : Fotokopi Supriyadi W.,dkk, Menyingkap Tabir Dispensasi Perkawinan, (Koalisi 18+: Jakarta), April 2016, (Halaman 24);
- k. Bukti P- 11: Fotokopi *Equalitynow.org/childmarriagereport*, UN CEDAW dan CRC *Recommendations on minimum age of marriage laws around the world*, November 2013, (Halaman 42-43);
- l. Bukti P- Fotokopi *Unicef.org, Reforming the Legislation on The Age of Marriage: Succesful Experiences and Lessons Learned From Latin America and the Caribbean*, 2016, (Halaman 19-20);
- m. Bukti P- 13: Fotokopi *Unicef.org, Reforming the Legislation on The Age of Marriage: Succesful Experiences and Lessons Learned From Latin America and the Caribbean*, 2016, (Halaman 19-20)

3. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi

Setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dalam persidangan, serta bukti-bukti yang diajukan, maka terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Terhadap dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, bertanggal 18 Juni 2015, Mahkamah antara lain mempertimbangkan:

Para pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2),

Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Bahwa beberapa agama yang berlaku di Indonesia maupun dari berbagai latar belakang budaya di nusantara ini mempunyai pengaturan yang berbeda dalam masalah usia perkawinan. Salah satu contohnya, agama Islam tidaklah mengatur mengenai usia minimum perkawinan akan tetapi yang lazim adalah dikenal sudah *aqil baligh*, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan salah satu perintah Allah *Subhanahuwata'ala* karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri, untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia pada zaman sekarang, di mana kemungkinan kemudharatan tersebut jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya,

sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram atau anak ranjang;

DPR memberikan keterangan secara tertulis yang antara lain menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk Undang-Undang yang melihat secara bijaksana dengan berbagai macam pertimbangan dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada pada saat itu yaitu tahun 1974;

Pada perkembangannya, beragam peraturan perundang-undangan yang selengkapannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara dan yang pada pokoknya menyatakan bahwa usia anak adalah sejak dia lahir, bahkan pada kondisi tertentu adalah saat masih dalam kandungan, sampai dengan mencapai usia 18 tahun. Namun, pembentuk Undang-Undang, dalam hal ini UU Perkawinan, saat itu menentukan batas umur untuk memenuhi tujuan ideal perkawinan, bagi pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Sebagaimana telah diuraikan baik oleh para saksi maupun ahli serta Pihak Terkait dalam persidangan, bahwa perkawinan anak memang rentan dan berpotensi menghadapi beragam permasalahan mulai dari kesehatan

fisik khususnya kesehatan reproduksi, kesehatan mental, hambatan psikologis dan sosial, dan yang tak kalah pentingnya adalah berpotensi mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak yang kesemuanya dapat berujung pada perceraian dan penelantaran anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta menambah beban ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan atau yang ikut menanggung kebutuhan dan keberlangsungan hidup anggota keluarga yang mengalami perceraian tersebut. Adapun Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, “Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.” Hal ini sesuai dengan tujuan luhur suatu perkawinan dan untuk menghindari beragam permasalahan sebagaimana didalilkan para Pemohon. Namun, terkait dengan norma yang mengatur batasan usia, Mahkamah dalam beberapa putusannya (vide Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 bertanggal 18 Oktober 2011, Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 bertanggal 15 Oktober 2010, dan Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 bertanggal 27 November 2007) telah mempertimbangkan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apa pun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam perkara *a quo*, UUD 1945 tidak mengatur secara jelas perihal batasan usia seseorang disebut

sebagai anak. Hal ini juga sama dengan pendapat dari perspektif hukum Islam yang dikemukakan oleh Ahli yang diajukan oleh para Pemohon yaitu Prof. Muhammad Quraish Shihab yang menyatakan, “... kitab suci Al Quran, demikian juga Sunnah Nabi, tidak menetapkan usia tertentu. Ini sejalan dengan hikmah Ilahi yang tidak mencantumkan rincian sesuatu dalam kitab suci menyangkut hal-hal yang dapat mengalami perubahan. Yang dirincinya hanya hal-hal yang tidak terjangkau oleh nalar seperti persoalan metafisika atau hal-hal yang tidak mungkin mengalami perubahan dari sisi kemanusiaan, seperti misalnya, ketetapan mengharamkan perkawinan anak dengan ibunya atau dengan ayahnya karena di situ selama manusia normal, tidak mungkin ada birahi terhadap mereka. Karena tidak adanya ketetapan yang pasti dari kitab suci, maka ulama-ulama Islam berbeda pendapat tentang usia tersebut bahkan ada di antara masyarakat Islam yang justru melakukan revisi dan perubahan menyangkut ketetapan hukum tentang usia tersebut. Ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhannya.”;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah nyata bahwa kebutuhan untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek baik itu aspek kesehatan hingga aspek sosial-ekonomi. Bahkan, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian,

menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya. Bukan berarti pula tidak perlu dilakukan upaya apa pun, terutama tindakan *preventif*, untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang dikhawatirkan akan menimbulkan beragam masalah sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, yang menurut Mahkamah, beragam masalah tersebut merupakan masalah konkrit yang terjadi tidak murni disebabkan dari aspek usia semata. Jikalaupun memang dikehendaki adanya perubahan batas usia kawin untuk wanita, hal tersebut bisa diikhtiarkan melalui proses *legislative review* yang berada pada ranah pembentuk Undang-Undang untuk menentukan batas usia minimum ideal bagi wanita untuk kawin.

Pada faktanya pun, sebagaimana didalilkan para Pemohon bahwa di negara-negara lain ada pula yang menetapkan bahwa batas usia minimal bagi wanita untuk kawin adalah 17 (tujuh belas) tahun, 19 (sembilan belas) tahun, maupun 20 (dua puluh) tahun. Jika Mahkamah diminta untuk menetapkan batas usia minimal tertentu sebagai batas usia minimal yang konstitusional, Mahkamah justru membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara untuk menentukan yang terbaik bagi warga negaranya sesuai dengan perkembangan peradaban dari setiap masa atau generasi, yang dalam hal ini terkait dengan kebijakan menentukan batas usia minimal kawin. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti, dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek lainnya, usia 18 (delapan belas)

tahun bukan lagi sebagai batas usia minimum yang ideal bagi wanita untuk menikah, namun bisa saja dianggap yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 18 (delapan belas) tahun tersebut sebagai usia yang ideal;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa merujuk pertimbangan dalam putusan yang menyatakan penentuan batas usia minimal perkawinan sebagai *legal policy*, hal itu dimaksudkan bahwa ketika pembentuk undang-undang menentukan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, kebijakan tersebut tidak serta-merta dapat dinilai sebagai *legal policy* yang bertentangan dengan UUD 1945. Namun pada saat yang sama, bukan pula berarti mengabaikan fakta bahwa batas usia minimal tertentu merupakan salah satu penyebab munculnya berbagai permasalahan dalam perkawinan seperti masalah kesehatan fisik dan mental, pendidikan, perceraian, sosial, ekonomi, dan masalah lainnya;

Bahwa, sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, kebijakan hukum (*legal policy*) tetap harus dalam kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan demikian juga berlaku dalam penentuan batas usia minimal perkawinan sehingga dalam

hal kebijakan hukum dimaksud nyata- nyata bertentangan dengan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, maka *legal policy* dapat diuji konstiusionalitasnya melalui proses pengujian undang-undang;

Bahwa dalam permohonan *a quo*, pada pokoknya para Pemohon menilai bahwa hak konstiusionalnya untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar oleh adanya pembatasan usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perlakuan yang tidak sama tersebut tidak saja menyebabkan terjadinya diskriminasi batas usia minimal atas dasar perbedaan jenis kelamin, melainkan juga perlakuan yang tidak sama terhadap anak dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945;

Bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 maka persoalan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi apakah terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk meninggalkan pendiriannya dalam menilai konstiusionalitas Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya. Sebagaimana telah disebutkan di atas, Mahkamah berpendirian bahwa suatu *legal policy* tidak dapat diuji konstiusionalitasnya kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan

yang *intolerable*, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstiusionalitas suatu *legal policy*, termasuk jika Mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya.

Konteks permohonan *a quo*, penentuan batas usia minimal perkawinan jelas tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan jelas pula bukan merupakan penyalahgunaan wewenang. Namun, bagaimana halnya dengan syarat tidak jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, tidak bertentangan dengan hak politik, ketidakadilan yang intolerable, dan syarat tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Pertanyaan demikian hanya dapat ditemukan jawabannya setelah Mahkamah menilai argumentasi dalam dalil para Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap dalil para Pemohon mengenai ketidaksetaraan antarwarga negara terkait adanya penentuan batas usia perkawinan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan, Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*), namun kebijakan *a quo* tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. Benar bahwa dikarenakan kodratnya maka dalam batas-batas

tertentu perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan menuntut pembedaan sehingga dalam konteks demikian pembedaan tersebut bukanlah diskriminasi dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas, serta ketidakadilan yang intolerable. Namun tatkala pembedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Pendirian *a quo* sejalan dengan pendapat-pendapat Mahkamah sebelumnya, di mana setiap kebijakan hukum yang memperlakukan setiap manusia dan/atau warga negara secara berbeda atas dasar perbedaan warna kulit, agama, suku, bahasa, keyakinan politik dan jenis kelamin adalah kebijakan yang bersifat diskriminatif. Hal tersebut juga sejalan dengan pengertian diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik

individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.

Ketika suatu kebijakan terbukti merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif maka sulit untuk menyatakan kebijakan demikian tidak melanggar moralitas, rasionalitas, tidak bertentangan dengan hak politik, maupun ketidakadilan yang *intolerable*. Kebijakan yang bersifat diskriminatif juga nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, jika Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 terbukti merupakan legal policy yang diskriminatif maka, sejalan dengan alasan untuk dapat menguji konstiusionalitas *legal policy* sebagaimana diuraikan di atas, hal demikian telah menjadi alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk meninggalkan pendiriannya dalam putusan terdahulu perihal perbedaan batas usia minimum perkawinan.

Konteks permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menampik bahwa ketika Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 disusun dan dibahas, penentuan batas usia merupakan salah satu bentuk kesepakatan nasional yang telah disepakati setelah mempertimbangkan secara bijaksana dan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku pada saat Undang-Undang *a quo* disusun yang kemudian disahkan pada tahun 1974. Namun, dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan diubahnya UUD 1945 (1999-2002), terjadi penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dengan dicantumkannya

pasal-pasal tentang jaminan hak asasi manusia, termasuk hak untuk membentuk keluarga dan hak anak.

Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dimaksud juga merupakan kesepakatan nasional, bahkan ia dirumuskan secara tegas dalam Konstitusi. Penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia *a quo* tentunya mengharuskan bangsa Indonesia untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan hukum masa lalu yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, termasuk apabila terdapat produk-produk hukum yang mengandung perlakuan berbeda atas dasar ras, agama, suku, warna kulit, dan jenis kelamin, maka sudah seharusnya pula untuk disesuaikan dengan kehendak UUD 1945 yang anti diskriminasi. Salah satu kebijakan hukum yang dapat dikategorikan mengandung perlakuan berbeda atas dasar jenis kelamin dimaksud adalah Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Hal demikian dalam putusan-putusan sebelumnya belum dipertimbangkan oleh Mahkamah dan pertimbangan demikian tidak muncul karena memang tidak didalilkan oleh para Pemohon pada saat itu. Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 dikatakan diskriminatif sebab dengan pembedaan batas usia minimum perkawinan yang termuat di dalamnya telah menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, semata-mata karena jenis kelaminnya. Hak-hak konstitusional dimaksud, antara lain,

hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena secara hukum seorang perempuan pada usia 16 tahun yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak) masih tergolong ke dalam pengertian anak, jika telah kawin akan berubah statusnya menjadi orang dewasa, sementara bagi laki-laki perubahan demikian baru dimungkinkan jika telah kawin pada usia 19 tahun; hak perempuan untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, juga mendapatkan perlakuan berbeda dari laki-laki di mana laki-laki akan menikmati hak itu dalam rentang waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan perempuan; hak untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki juga potensial terhalang karena dengan dimungkinkannya seorang perempuan untuk kawin pada usia 16 tahun akan cenderung lebih terbatas aksesnya terhadap pendidikan dibandingkan dengan laki-laki, bahkan untuk sekadar memenuhi pendidikan dasar, padahal hak atas pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara menurut Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang seharusnya dapat dinikmati secara setara dengan laki-laki. Bahkan, dalam kaitan ini, seorang perempuan yang tidak memenuhi pendidikan dasarnya akan potensial dinilai melanggar kewajiban konstitusionalnya sebab

menurut Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Artinya, jika batas usia minimum perkawinan 16 tahun untuk perempuan dipertahankan, hal demikian tidak sejalan dengan agenda pemerintah ihwal wajib belajar 12 tahun karena jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun maka dia akan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan 12 tahun.

Dengan demikian, meski kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal batas minimal usia 16 perkawinan dimaksud dahulunya merupakan sebuah kesepakatan nasional, namun dalam perkembangan hukum dan konstitusi Indonesia, hal tersebut tidak lagi relevan karena terkategori sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang demikian haruslah dinilai konstiusionalitasnya. Berdasarkan hal itu, pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Hal demikian berbeda dengan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yang mengharuskan menunggu lebih lama dibandingkan

perempuan. Di samping itu, perbedaan batas usia minimal tersebut memberi ruang lebih banyak bagi anak laki-laki untuk menikmati pemenuhan hak-haknya sebagai anak karena batas usia kawin minimal laki-laki yang melampaui usia minimal anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Sementara bagi perempuan, pembatasan usia minimal yang lebih rendah dibanding usia anak justru potensial menyebabkan anak tidak sepenuhnya dapat menikmati hak-haknya sebagai anak dalam usia anak, sebagaimana telah disinggung di atas.

Menimbang bahwa sekalipun ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif atas dasar jenis kelamin, namun tidak serta-merta Mahkamah dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, namun penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Mahkamah perlu menegaskan kembali pendirian a quo disebabkan Mahkamah tetap meyakini bahwa kebijakan terkait penentuan batas usia minimal perkawinan dapat saja berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan berbagai aspek dalam masyarakat. Pada saat Mahkamah menentukan batas usia tertentu sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, hal demikian tentunya akan dapat menghambat pembentuk Undang-Undang dalam melakukan

perubahan ketika ia harus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat.

Menimbang bahwa meskipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang, namun pembentuk undang-undang secara cermat harus memastikan bahwa kebijakan demikian tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketidakpastian hukum mana akan muncul karena adanya perbedaan dalam menentukan batas usia anak. Pembentuk Undang-Undang dituntut untuk konsisten dalam menentukan pilihan kebijakan hukumnya terkait usia anak dimaksud.

Bahwa dalam konteks permohonan *a quo* mengingat terdapatnya perbedaan dan ketidaksinkronan sejumlah undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang batas usia anak, yang tidak dapat dipisahkan dengan usia kawin dalam UU 1/1974. Dalam hal ini, ketidaksinkronan dimaksud terlihat nyata dengan ketentuan yang terdapat antara lain dalam UU Perlindungan Anak. Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dinyatakan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dengan demikian, batas usia kawin bagi perempuan sebagaimana termaktub dalam

Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 yaitu mencapai umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan masih terkategori sebagai anak menurut Pasal (1) angka 1 UU Perlindungan Anak. Oleh karenanya perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.

Bahwa apabila diletakkan dalam konteks yang lebih luas, perkawinan anak sangat mungkin mengancam dan berdampak negatif bagi anak termasuk kesehatan anak karena belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi anak. Tidak hanya masalah kesehatan, perkawinan yang belum melampaui batas usia anak sangat mungkin terjadinya eksploitasi anak dan meningkatnya ancaman kekerasan terhadap anak. Di atas itu semua, perkawinan anak akan menimbulkan dampak buruk terhadap pendidikan anak. Dalam batas penalaran yang wajar, apabila pendidikan anak terancam, hal demikian potensial mengancam salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit dicapai jikalau angka perkawinan anak tidak bisa dicegah sedemikian rupa.

Menimbang bahwa dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya anak perempuan, Penjelasan angka 4 huruf d UU 1/1974 secara eksplisit menyatakan “menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur”. Artinya, Penjelasan tersebut hendak menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Terkait dengan larangan tersebut, Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, kepada orang tua dibebankan kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Ihwal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, yang dimaksud adalah usia sebelum 18 tahun. Sementara itu, merujuk Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974, batas usia minimal perkawinan perempuan ditentukan 16 tahun. Secara horizontal, materi kedua pengaturan tersebut menunjukkan ketidaksinkronan antara batas minimal usia perkawinan bagi anak perempuan dalam UU 1/1974 dengan usia anak dalam UU Perlindungan Anak sehingga secara nyata norma tersebut tidak sinkron. Apabila diletakkan dalam konteks perlindungan anak, ketidaksinkronan dimaksud justru berdampak terhadap jaminan dan perlindungan konstitusional hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut melalui UU Perlindungan Anak.

Bahwa adanya jaminan konstitusional hak-hak anak memunculkan kewajiban bagi semua pihak, baik orang tua, keluarga, pemerintah maupun negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak anak. Pada saat yang sama, kewajiban tersebut juga disertai dengan jaminan hak anak selama masa pengasuhan sebagai anak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Hak anak untuk bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, dan ketidakadilan haruslah ditegakan dengan juga memberikan kepastian hukum bagi tidak adanya perkawinan anak. Pada saat kebijakan hukum, dalam hal ini Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 membuka ruang untuk dilangsungkannya perkawinan anak, maka norma tersebut justru memberi kesempatan untuk terjadinya eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual.

Agar ketidakpastian hukum perlindungan hak anak tidak terus terjadi akibat ketentuan minimal usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974, maka sudah seharusnya batas usia minimal

perkawinan dalam norma *a quo* disesuaikan dengan batas usia anak yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak. Oleh karena usia anak yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang dalam UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka sudah seharusnya kebijakan hukum yang sama mengenai usia *a quo* juga diterapkan dalam UU 1/1974.

Menimbang bahwa perlunya perubahan kebijakan batas usia perkawinan juga didasarkan atas fakta bahwa semakin meningkatnya angka perkawinan anak akan menyebabkan kesulitan bagi negara dalam mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berisi 17 tujuan dengan 169 target. Target-target yang didefinisikan bersifat aspiratif dan global, di mana pemerintah masing-masing negara dapat menyusun target nasionalnya sendiri dengan mengacu pada semangat di tingkat global namun disesuaikan dengan situasi nasional. Masing-masing negara memutuskan bagaimana target-target aspiratif dan global ini dapat dimasukkan dalam proses perencanaan, kebijakan dan strategi nasional. Tujuan menyepakati dokumen SDGs ini adalah pada tahun 2030 tidak ada satu negara pun yang tertinggal (*no one will be left behind*) dalam rangka pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan menekan angka pernikahan anak sebagaimana tertuang dalam Tujuan Kelima SDGs yakni “Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak

perempuan” (*Achieve gender equality and empower all women and girls*). Salah satu tujuan yang hendak diwujudkan pada Tujuan SDGs adalah menghapus perkawinan anak (*Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage*).

Pernikahan anak merupakan salah bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menimbulkan kemudharatan. Hak ini sejatinya dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya ditegaskan pula dalam UU Perlindungan Anak bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi haknya adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Namun, bukti menunjukkan bahwa pernikahan anak semakin meningkat dengan sebaran angka perkawinan anak di atas 10% merata berada di seluruh provinsi Indonesia, sedangkan sebaran angka perkawinan anak di atas 25% berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia (vide Data BPS, 2017). Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena anak telah kehilangan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Jika kondisi ini dibiarkan tentu akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi “Darurat Perkawinan Anak”, dan tentu saja akan semakin menghambat

capaian tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Oleh karenanya semua kebijakan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan anak sudah seharusnya disesuaikan, in casu UU 1/1974 yang telah berlaku selama 44 tahun. Jika dirunut ke belakang usulan penyempurnaan UU 1/1974 tersebut telah masuk sejak Propenas tahun 2000-2004. Karena tidak berhasil, kemudian diteruskan dalam beberapa Prolegnas, yang terakhir adalah Prolegnas 2015-2019. Berkenaan dengan perkembangan tuntutan global yang telah disepakati yang sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sehingga Mahkamah berpendapat penyempurnaan tersebut dapat lebih cepat dilakukan.

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, secara faktual, ikhtiar dan prakarsa untuk meningkatkan batas usia perkawinan terkhusus perempuan telah dilakukan di beberapa daerah provinsi dan daerah kabupaten dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi perkawinan di bawah umur melalui pemberlakuan peraturan Kepala Daerah Kabupaten maupun Provinsi antara lain:

- a. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Kidul Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

- c. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
- d. Surat Edaran Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 150/1138 Tahun 2014 yang menganjurkan usia layak nikah pada umur 21 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki.

Upaya-upaya demikian juga berada pada titik temu dengan aneka agenda kebijakan pemerintah seperti program keluarga berencana dan generasi berencana (genre), pelaksanaan 12 (dua belas) tahun wajib belajar, pendidikan kesehatan reproduksi dan lain-lain. Demikian pula peran dinamis dari kaum muda yang mengambil peran dan memelopori demi mendorong pembuatan kebijakan dan alternatif-alternatif yang digagas dalam pendekatan upaya menyadarkan akan bahaya perkawinan di bawah umur dan cita-cita luhur tujuan ideal perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa tuntutan untuk menyesuaikan kebijakan usia minimal perkawinan juga didasarkan atas fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pihak *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Perjanjian Internasional Untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tersebut telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

(*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Dalam Pasal 16 ayat (1) *CEDAW* dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Negara-negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan:
 - b. Hak yang sama untuk melakukan perempuan;

Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban negara-negara pihak untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan, khusus terkait hak untuk melakukan perkawinan, *United Nations (UN) CEDAW* merekomendasikan agar negara pihak menaikkan batas minimum usia perkawinan berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan. Sehubungan dengan *CEDAW* dan rekomendasi *UN CEDAW* dimaksud, Mahkamah sesungguhnya bukan hendak menjadikan *UN CEDAW* sebagai dasar pengujian dalam permohonan *a quo*, sebab *CEDAW* adalah setingkat dengan undang-undang. Hanya saja, Mahkamah hendak menegaskan bahwa pembentuk undang-undang perlu melakukan sinkronisasi pengaturan batas usia minimal perkawinan dengan UU Perlindungan Anak yang juga sejalan dengan UU Ratifikasi *CEDAW*. Karena ketidaksinkronan tersebut akan menyebabkan terlanggarnya hak-hak perempuan dan anak yang secara tegas telah dijamin dalam UUD 1945.

Menimbang bahwa sekalipun dalil-dalil yang disampaikan Pemohon beralasan menurut hukum, namun tidak serta-merta Mahkamah akan menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 sepanjang frasa “umur 16 (enam belas) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak

memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “umur 19 (sembilan belas) tahun” sebagaimana dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya.

Bahwa sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang. Apabila Mahkamah memutuskan batas minimal usia perkawinan, hal tersebut justru akan menutup ruang bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usia perkawinan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Sebelum dilakukan perubahan dimaksud, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 masih tetap berlaku.

Bahwa apabila dalam tenggang waktu tersebut pembentuk undang-undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan yang berlaku saat ini, demi untuk memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 diharmonisasikan dengan usia anak

sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil permohonan pemohon sepanjang ketentuan pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

4. Amar Putusan

Amar putusan keputusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang Review Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU 1/1974) mengadili dan menyatakan;

- 1) Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
- 2) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3) Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

- 4) Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan;
- 5) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- 6) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal lima, bulan April, tahun dua ribu delapan belas, dan delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal lima, bulan Desember, tahun

dua ribu delapan belas, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 10.37 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Mahkamah Konstitusi kembali memutus pengujian konstitusionalitas frasa “umur 16 tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah berlaku selama kurang lebih 44 (empat puluh empat) tahun di Indonesia. Frasa tersebut dianggap sebagai penyebab maraknya perkawinan anak yang melanggar hak-hak anak khususnya perempuan, sehingga batasnya perlu dinaikkan. Rasanya, baru tiga tahun, frasa yang semula dinyatakan konstitusional dalam Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 justru menjadi inkonstitusional pada Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Yang pasti, langkah hakim tersebut dianggap sebagai pintu masuk untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan.

Secara yuridis-normatif putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, dalam arti memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak

ada upaya hukum lain untuk dilakukannya banding atau kasasi. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat diwajibkan untuk merevisi norma yang telah dibatalkan sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Jika tidak, usia 18 tahun dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara otomatis menjadi rujukan norma tentang batas usia minimal perkawinan bagi perempuan. Prinsipnya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh diabaikan, kendati demikian perlu dikritisi dengan menyampaikan beberapa catatan penting terhadap pertimbangan yang digunakan hakim konstitusi.

Pertama, argumentasi hakim yang menyatakan penentuan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan merupakan kebijakan hukum yang terbukti diskriminatif atas dasar perbedaan gender dikarenakan terhalangnya pemenuhan hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan adalah argumentasi yang tidak beralasan. Sebab jika ditelusuri, persoalan sesungguhnya bukan terletak pada normanya, akan tetapi lebih pada konteks penerapan atau implementasi norma yang dalam praktik ternyata tidak sesuai dengan asas dan tujuan perkawinan. Hakim tampaknya tidak menyadari bahwa perkawinan yang dilakukan para pemohon pada perkara tersebut justru tidak sesuai dengan batas umur minimal yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan yaitu 16 tahun. Dalam hal ini para pemohon menikah di usia 13-14 tahun yang lazimnya digolongkan sebagai perkawinan di bawah umur. Perkawinan ini

memang sah, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, misal dengan meminta dispensasi pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan. Hanya saja, berdasarkan dalil pemohon, terungkap bahwa perkawinan yang dilangsungkan bukan karena kehendak sendiri melainkan dipaksa orang tua dengan alasan ekonomi. Ini merupakan bentuk perkawinan yang tidak dibenarkan Undang-Undang Perkawinan, karena seharusnya sebuah perkawinan dilaksanakan atas dasar kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, dan kemitraan suami istri. Ketika itu dilanggar, maka sama saja mengingkari asas dan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga dapat dipastikan akan menciderai hak-hak perempuan itu sendiri.

Kedua, pandangan hakim yang menekankan perlunya sinkronisasi batas usia minimal perkawinan dengan usia anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ratifikasi CEDAW adalah hal yang absurd. Sebenarnya jika dipahami secara utuh, Undang-Undang Perkawinan mengatur batasan umur menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 21 tahun. Bila terjadi perkawinan dibawah umur, maka Undang-Undang Perkawinan memberi peluang dengan menentukan batasan umur minimal kepada laki-laki dan perempuan yang hendak menikah yaitu 19 dan 16 tahun dengan syarat harus mendapatkan izin nikah. Perlu dicatat, batas usia minimal tersebut tidak berlaku secara mutlak. Jika dengan alasan tertentu terjadi perkawinan di usia yang lebih muda, maka hal itu

diperbolehkan dengan catatan harus memenuhi prosedur tertentu misalnya permintaan dispensasi nikah.

Artinya, Undang-Undang Perkawinan tidak hanya sekedar memberi pilihan-pilihan hukum terkait dengan batas umur perkawinan, tetapi juga disertai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi setiap warga negara yang hendak melangsungkan pernikahan. Dari sini dapat dikatakan, Undang-Undang Perkawinan telah mengakomodir berbagai hal terkait perkawinan secara jelas dan tegas (*expressive verbis*). Hal ini tentu dapat dipahami, karena inilah undang-undang pertama yang mengatur masalah perkawinan secara nasional sehingga menjadi tolak ukur hukum keluarga bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan adalah Undang-Undang yang bersifat khusus, maka jika menggunakan pendekatan asas hukum, berlaku satu asas yang disebut *lex specialis derogat legi generalis*. Aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum.

Untuk itu, menjadi tidak relevan bila Undang-Undang Perkawinan tunduk atau harus disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena UU Perlindungan Anak adalah aturan yang bersifat umum, dalam pengertian tidak secara spesifik menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan termasuk batas usia minimal perkawinan selain menegaskan definisi anak yang dimaknai seseorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sekalipun dapat dimaklumi sinkronisasi horizontal antara Undang-Undang Perkawinan

dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dimaksudkan hakim sebagai bentuk preventif dalam mewujudkan hak-hak anak perempuan, namun ikhtiar tersebut menjadi paradoks karena menabrak asas-asas hukum yang berlaku. Begitu pula sinkronisasi terhadap Undang-Undang Ratifikasi CEDAW yang telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia sebagai sebuah undang-undang.

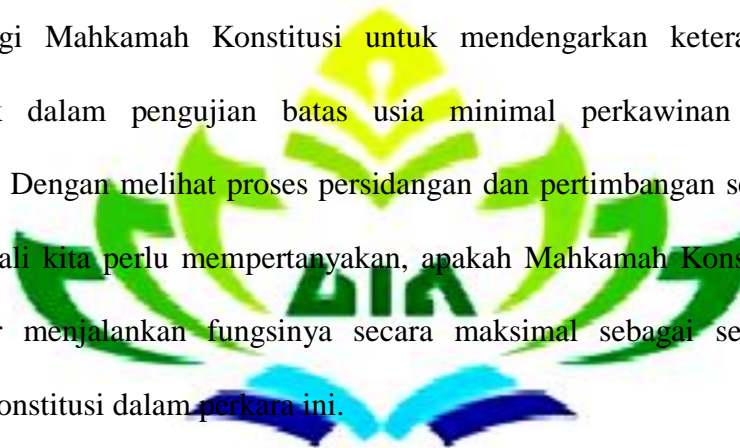
Selain masalah pertimbangan hakim, hal lain yang juga mencuri perhatian terkait dengan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 ini adalah proses persidangannya. Berdasarkan risalah yang diperoleh dari Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, sidang hanya digelar sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan perbaikan permohonan dan pembacaan putusan. Hal ini jauh berbeda dengan sidang pada perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang berlangsung sebanyak 10 (sepuluh) kali. Tentu, hakim mempunyai argumentasinya sendiri terkait penalaran waktu yang dianggap wajar dalam memutus suatu perkara. Apalagi tidak ditemukan satu aturan yang mengatur batas waktu penyelesaian dalam pengujian undang-undang. Panjang pendeknya tergantung dari konstusionalitas perkara yang ditangani hakim. Dalam praktik, Mahkamah Konstitusi bahkan pernah memutus perkara pengujian Undang-Undang dengan proses yang cepat seperti putusan terkait syarat capres di tahun 2004 dan KTP sebagai alat verifikasi memilih. Dua putusan itu sangat dibutuhkan karena faktor kegentingan dalam pelaksanaan pemilu.

Namun dengan melihat seluruh catatan risalah perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 hingga dibacakannya putusan, tidak berlebihan rasanya jika muncul penilaian miring bahwa ada tahapan yang diabaikan oleh hakim dalam pengujian norma batas usia menikah bagi perempuan. Pada umumnya, ketika hakim hendak menjatuhkan sebuah putusan, maka ia akan berpijak pada apa yang dinamakan dengan fakta hukum. Pertimbangan dan keyakinan hakim salah satunya diperoleh dan dipengaruhi fakta yang terungkap dalam persidangan. Itulah sebabnya fakta hukum merupakan "*conditio sine qua non*" bagi terwujudnya putusan yang adil. Fakta hukum dapat berupa surat atau tulisan, keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli petunjuk dan alat bukti berupa informasi atau komunikasi elektronik. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 36 ayat (1).

Anehnya, pada perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 sebelum mempertimbangkan pokok permohonan hakim konstitusi justru berpendapat "**tidak terdapat urgensi**" untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan Pasal 54 Undang-Undang MK. (Salinan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, hal.40). Patut diketahui, keterangan pihak-pihak yang dimaksud antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Dua lembaga ini sebenarnya memegang peranan yang sangat penting dalam setiap pengujian Undang-Undang karena kedudukannya sebagai pembentuk undang-undang. Memang, tidak ada yang salah dengan langkah yang diambil Mahkamah Konstitusi,

karena Undang-Undang dan hukum acaranya membuka peluang tersebut, apalagi hakim berdasarkan prinsip kebebasan hakim atau *freedom and impartial judiciary* seperti yang dinyatakan Peter. H Russel mempunyai independensi dalam memutus perkara termasuk dalam menilai apakah suatu perkara perlu didalami ataukah tidak.

Maka bukankah menjadi suatu kesalahan yang fatal ketika hakim mengenyampingkan fakta hukum seperti keterangan saksi, keterangan para pihak, dan keterangan ahli yang harusnya dimuat dalam pertimbangan hukum? Apalagi hanya dengan alasan, bukan menjadi suatu hal yang penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak dalam pengujian batas usia minimal perkawinan bagi perempuan. Dengan melihat proses persidangan dan pertimbangan seperti itu barangkali kita perlu mempertanyakan, apakah Mahkamah Konstitusi benar-benar menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai sebagai pengawal konstitusi dalam perkara ini.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan, Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Adapun fungsi dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mengesahkan tindak perkawinan, baik yang dilaksanakan secara agama tertentu maupun secara adat, sesuai dengan yang diungkapkan pada Pasal 1, dimana perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; juga sebagaimana yang diungkapkan pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi fungsi UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah memberikan pengesahan terhadap tindak perkawinan tersebut.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juga mengatur tentang batas usia minimal perkawinan dikarenakan syarat sahnya perkawinan adalah bahwa

para pihak yang akan melakukan perkawinan telah siap jiwa raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas usia minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

Ayat (1). Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.

Ayat (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Ayat (3). Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut Ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dengan Pasal 6 Ayat (6).

Menurut penulis batasan usia perkawinan di Indonesia tidak konsisten. Di satu sisi, Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapatkan izin kedua orang tua, di sisi lain pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu izin pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan kembali tentang batasan usia pernikahan dalam Pasal 15 Ayat 1 dan 2, sebagaimana berikut:

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami

- sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*
- (2) *Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.*

Mengenai batas usia, syariat Islam tidak mengatur usia tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, persis seperti harus pahamnya apa itu shalat bagi orang yang melakukan ibadah shalat, haji bagi yang berhaji, transaksi dagang bagi pebisnis. Islam dengan jelas dan tegas mendukung sebuah pernikahan dengan syarat jika seorang pria ataupun wanita telah baligh dan mampu bertanggung jawab atas dirinya dan juga orang lain yang akan ia nikahi. Dan untuk mengendalikan hawa nafsu adalah pekerjaan yang tidak mudah, karena hanya mereka yang dapat menstabilkan ego dan meredam hawa nafsu yang dapat menjalani pernikahan sesuai dengan aturan agama.

Menurut penulis usia pernikahan di Indonesia tidak relevan lagi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak serta secara medis, sosial, ekonomi, dan juga didalam syariat Islam tidak menegaskan tentang usia ideal untuk menikah, karena ideal untuk menikah dalam Islam adalah jika sudah baligh dan sudah mampu, perkawinan anak telah dibuktikan dari berbagai penelitian lebih menimbulkan *mudarat* daripada manfaatnya. Maka dari itu Pemerintah harus segera melakukan perubahan dalam Undang-Undang Perkawinan, yang

mengatur batas usia perkawinan anak sehingga tidak lagi bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Al-Qur'an merupakan sumber utama untuk hukum Islam yang meletakkan dasar dan prinsip umum hukum Islam. Begitu pula dengan Sunnah atau Hadis sebagai sumber hukum kedua yang fungsinya sebagai penjelas isi kandungan dari Al-Qur'an yang keduanya menjadi dasar hukum Islam dan sebagai pedoman hidup bagi manusia.

Semakin berkembangnya zaman dan peradaban masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai masalah yang belum dijelaskan secara tegas dalam al-Quran dan Hadis. Maka, dibutuhkan seseorang yang dianggap mampu untuk menyelesaikan atau memutuskan perkara yang terjadi ditengah masyarakat yang pada era modern kini disebut sebagai seorang hakim (dalam khazanah Islam disebut dengan *qadhi*). Fungsi seorang hakim ialah untuk menerapkan hukum. Hal itu dilakukan agar terciptanya kehidupan yang tenteram, sejahtera dan berkeadilan.

Perkara yang diajukan oleh pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 April 2017 yang berupa uji materil Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, menyatakan bahwa frasa yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan: "*perkawinan hanya*

diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan para pemohon meminta batas usia minimal perkawinan laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun.

Hakim mempertimbangkan perkara tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif atas dasar jenis kelamin, namun tidak serta-merta Mahkamah dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, namun penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang.

Mahkamah perlu menegaskan kembali pendirian *a quo* disebabkan Mahkamah tetap meyakini bahwa kebijakan terkait penentuan batas usia minimal perkawinan dapat saja berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan berbagai aspek dalam masyarakat. Pada saat Mahkamah menentukan batas usia tertentu sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, hal demikian tentunya akan dapat menghambat pembentuk Undang-Undang dalam melakukan perubahan ketika ia harus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat.

Penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang, namun pembentuk Undang-Undang secara cermat harus memastikan bahwa kebijakan demikian tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketidakpastian hukum maka akan muncul karena adanya perbedaan dalam menentukan batas usia anak. Pembentuk Undang-Undang dituntut untuk konsisten dalam menentukan pilihan kebijakan hukumnya terkait usia anak dimaksud yaitu yang berusia dibawah 18 tahun sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Terdapat perbedaan dan ketidaksinkronan sejumlah Undang-Undang yang di dalamnya mengatur tentang batas usia anak, yang tidak dapat dipisahkan dengan usia kawin dalam UU No. 1/1974. Dalam hal ini, ketidaksinkronan dimaksud terlihat nyata dengan ketentuan yang terdapat antara lain dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dinyatakan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dengan demikian, batas usia kawin bagi perempuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu mencapai

umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan masih terkategori sebagai anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karenanya perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.

Bahwa dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya anak perempuan, penjelasan angka 4 huruf d Undang-Undang No.1 Tahun 1974 secara eksplisit menyatakan “menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur”. Artinya, penjelasan tersebut hendak menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Terkait dengan larangan tersebut, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat nya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, kepada orang tua dibebankan kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. hal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud adalah usia sebelum 18 tahun. Sementara itu, merujuk Pasal 7

ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, batas usia minimal perkawinan perempuan ditentukan 16 tahun. Secara horizontal, materi kedua pengaturan tersebut menunjukkan ketidaksinkronan antara batas minimal usia perkawinan bagi anak perempuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan usia anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga secara nyata norma tersebut tidak sinkron. Apabila diletakkan dalam konteks perlindungan anak, ketidaksinkronan dimaksud justru berdampak terhadap jaminan dan perlindungan konstitusional hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Amandemen kedua UUD 1945 yang diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Perlindungan Anak.

Adanya jaminan konstitusional hak-hak anak memunculkan kewajiban bagi semua pihak, baik orang tua, keluarga, pemerintah maupun negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak anak. Pada saat yang sama, kewajiban tersebut juga disertai dengan jaminan hak anak selama masa pengasuhan sebagai anak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidak adilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Hak anak untuk bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, dan ketidakadilan haruslah ditegakkan, juga memberikan kepastian hukum tentang adanya tindakan perkawinan anak. Pada saat kebijakan hukum, dalam hal ini Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 membuka ruang untuk dilangsungkannya perkawinan anak, maka norma tersebut justru memberi kesempatan untuk terjadinya eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual.

Agar ketidakpastian hukum perlindungan hak anak tidak terus terjadi akibat ketentuan minimal usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka sudah seharusnya batas usia minimal perkawinan dalam norma *a quo* disesuaikan dengan batas usia anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena usia anak yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka sudah seharusnya kebijakan hukum yang sama mengenai usia *a quo* juga diterapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Sekalipun dalil-dalil yang disampaikan Pemohon beralasan menurut hukum, namun tidak serta-merta Mahkamah akan menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sepanjang frasa “umur 16 (enam belas) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

sepanjang tidak dibaca “umur 19 (sembilan belas) tahun” sebagaimana dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil permohonan pemohon sepanjang ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dalam putusannya, frasa “usia 16 tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan masih tetap dinyatakan berlaku hingga tenggat waktu yang ditentukan dalam putusan ini.

Mahkamah Konstitusi menilai perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau *gender* yang berdampak tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian hak asasi manusia (HAM) yang dijamin Konstitusi. Karena itu, dalil permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Sekalipun dalil permohonan beralasan menurut hukum, namun Mahkamah Konstitusi tidak bisa serta merta (otomatis) menyatakan

(memutuskan) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sepanjang frasa umur 16 tahun inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dibaca “usia 19 tahun” sebagai petitum permononan pemohon. Artinya, Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengabulkan keinginan para pemohon yang meminta batas usia minimal perkawinan laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun karena hal ini menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang (*positive legislator*).

Seperti sudah ditegaskan Mahkamah sebelumnya, penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk Undang-Undang. Sebab, apabila Mahkamah memutuskan batas usia minimal perkawinan, justru akan menutup ruang pembentuk Undang-Undang dikemudian hari guna mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai perkembangan hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah memberi tenggang waktu selama 3 tahun kepada pembentuk Undang-Undang untuk segera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas usia minimal perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan itu. Namun sebelum dilakukan perubahan, maka Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan masih tetap berlaku.

Meski demikian, apabila dalam tenggang waktu 3 tahun pembentuk Undang-Undang belum mengubah aturan batas minimal perkawinan, demi kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang timbul, maka batas usia perkawinan itu diharmonisasikan dengan usia anak (di bawah 18 tahun)

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, penulis berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum serta Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon yakni dalam hal memperjuangkan hak-hak anak khususnya perempuan dalam batas minimal usia perkawinan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena apabila batas minimal perkawinan tersebut tidak ditingkatkan maka banyak anak-anak terutama anak perempuan yang kehilangan masa kanak-kanak serta pendidikannya, ditambah lagi kesehatan yang terancam dan masih banyak lagi permasalahan yang dapat ditimbulkan, seperti masalah kesehatan fisik dan mental, pendidikan, perceraian, sosial, ekonomi, dan masalah lainnya. Maka dengan dibatakannya frasa yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1), hakikat dari tujuan perkawinan dapat tercapai sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 KHI yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan adalah suatu aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*

mawaddah warahmah. Dan hukumnya dapat berubah sesuai berubahnya “*Illah*”, yaitu dapat menjadi sunnah, makruh, haram dan wajib.

Mengenai masalah perkawinan ini, manusia hendaknya mampu memutuskan untuk menikah dan sekaligus memiliki kesiapan yang matang dalam mengarungi bahtera rumah tangga, yang dalam perspektif keimanan berarti orang yang akan melangsungkan perkawinan harus meyakini adanya nasib baik dan nasib buruk serta menyerahkan semua kepada Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nur [24]: 32 bahwa apabila seseorang telah memiliki kesiapan untuk menikah maka Allah memberikan pertolongan, agar seseorang dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan penuh ketentraman.

Islam tidak memberikan batasan umur dalam melakukan perkawinan, namun ditekankan perlu adanya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan (hal-hal buruk) baik itu secara biologis maupun secara psikologis. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan, diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya.

Batas perkawinan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa batas usia standar adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sementara dalam pasal lain ditetapkan pula bahwa perkawinan dapat terlaksana ketika usia perkawinan kedua mempelai adalah 21 tahun. Pada dasarnya batasan usia perkawinan di Indonesia tidak konsisten. Di satu

sisi, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan ijin kedua orang tua, di sisi lain pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan ijin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu ijin pengadilan.

Atas dasar menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemaslahatan, Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal itu bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan permasalahan yang ditimbulkan oleh Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 seperti masalah kesehatan fisik dan mental, pendidikan, perceraian, sosial, ekonomi, dan masalah lainnya.

Terkait pertimbangan hakim dalam putusan uji materi Undang-Undang Perkawinan terhadap frasa yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1), yang mana Hakim Mahkamah memutuskan untuk mengabulkan permohonan uji materi para pemohon dengan membatalkan frasa yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan yang berbunyi: *“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*

dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” dengan alasan Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali” dan Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “semua berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Serta bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Terdapat sisi mashlahat dengan dibatalkannya Pasal 7 ayat (1) yaitu bahwa hak asasi anak khususnya perempuan terlindungi dan terjamin karena akan ditingkatkannya batas minimal usia perkawinan dan diharapkan tidak ada lagi yang menikah diusia anak-anak karna melihat *mudharat* yang ditimbulkan sangat besar.

Penulis berpendapat batas usia minimal perkawian adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, sebagaimana yang dijelaskan oleh lembaga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengenai batas minimal usia perkawinan. Ada beberapa

pertimbangan dengan ditingkatkannya batas usia menikah tersebut, antara lain Berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata. Rekomendasi ini ditujukan demi untuk kebaikan masyarakat, agar pasangan yang baru menikah memiliki kesiapan matang dalam mengarungi rumah tangga, sehingga dalam keluarga juga tercipta hubungan yang berkualitas. Dalam berumah tangga untuk menjaga keharmonisannya bukan suatu pekerjaan yang mudah, karena memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap adanya guncangan yang muncul, baik guncangan akibat ekonomi, masalah internal maupun eksternal.

Dilihat sisi *kemashlahatan* di atas, maka penulis berpendapat, setuju dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah : **جَلْبُ الْمُنْفَعَةِ وَدَفْعُ الْمَفْسَدَةِ** (menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan).

Sesuai dengan kaidah tersebut, maka dengan dibatalkannya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, menjamin hak perempuan untuk tidak dinikahkan dimasa kanak-kanak. Karena jika tidak dibatalkan frasa tersebut, maka akan menimbulkan mudharat dan membuka ruang untuk dilakukannya pernikahan dini.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwasanya permohonan pemohon serta argumen dari Mahkamah Konstitusi dapat dibenarkan untuk menaikkan tingkat batas minimal usia perkawinan, sebagaimana sesuai dengan kaidah masalah mursalah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal di antaranya sebagai berikut:

1. Batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Peraturan tersebut tidak relevan lagi karna bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak serta akan berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi dan kesehatan pihak yang bersangkutan.
2. Bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan No. 22/PUU-XV/2017 mengenai permohonan uji materiil Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, bahwasannya Pasal tersebut telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian hak asasi manusia yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi lebih memperjuangkan hak asasi manusia dan menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Dipandang dari segi kemashlahatan di atas, maka Hukum Islam lebih mengedepankan pada kemashlahatan yang lebih besar yaitu pada Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang bertujuan untuk menghindari kemudharatan yang akan terjadi apabila tetap berlakunya pasal *a quo* dan menjamin serta melindungi hak asasi anak, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah: **جَلْبُ الْمُنْفَعَةِ وَدَفْعُ الْمَفْسَدَةِ** (menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan). Dengan demikian hukum Islam tidak melarang dengan adanya batas minimal usia perkawinan serta sesuai dengan konstitusi di Indonesia.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Sudah seharusnya kita semua berbuat untuk mencegah lajunya peningkatan pernikahan dibawah umur. Untuk menekan peningkatan pernikahan dibawah umur perlu kesadaran masyarakat akan dampak yang terjadi akibat pernikahan dibawah umur tersebut.
2. Sebaiknya pihak pemerintah terkait lebih meningkatkan kerjasama untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat, selain meningkatkan batas minimal usia perkawinan, pemerintah juga harus membentuk instansi atau team khusus yang langsung terjun dimasyarakat untuk memberikan penyuluhan akan dampak bahaya pernikahan dibawah umur. Terutama di

daerah pedesaan bahkan dipelosok-pelosok negeri yang relatif masih banyak terjadi pernikahan dibawah umur atau masih anak-anak yang sebenarnya belum siap untuk membentuk rumah tangga.

3. Selain itu orang tua dan guru disekolah berperan penting untuk mendidik anak remaja, terutama tentang dampak buruk dari pernikahan dibawah umur serta mengedepankan kedewasaan sebelum membentuk rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ketiga Jakarta, Amzah, 2014.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Ke-4 Jakarta, Akademika Pressindo, 2010.

Abd al-Rahmân al-Jazîry, *Kitab al-Fiqh 'Alâ Madzhâhib al-Arba'ah*, Juz 4, Maktabah Al-Kubra.

Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Jogjakarta:Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan keempat Jakarta : Rajawali Press, 2003.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan ke- 2 jakarta, Rajawali pers, 2015.

Ahmad Tholabi Kharie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta :Sinar Grafika, 2013.

Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cetakan Kedua Puluh Lima, Pustaka Progressif, Surabaya, 2002.
Al- Qur'an dan Al- Hadist.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid I*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Prenada Media, 2008.

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Ke-6, Jakarta: Kencana, 2016.

Badruzzaman Siddik, *Perkembangan Peradilan di Indonesia Sejak Zaman Kolonial Belanda Sampai Sekarang* , (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan(Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*,Cetakan ke-III, Jakarta : Akademika Pressindo, 2003.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Dewani Romli, *Fiqih Munakahat*, Cetakan pertama, Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009.

Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan Indonesia, Menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan ke-3 Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 2017.

Ibnu Hajar Atsqalani, *Bulughul Maram: Min Adilatil Ahkam, Alih Bahasa, Masdar Helmy, Terjemahan Hadits Bulughul Maram*, Cetakan Ketiga, Hadist Nomor 996, CV Gema Risalah Press, Bandung.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahnya)*, Bandung: Pustaka Al-Mubin, 2013.

M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cetakan Kedua, Jakarta: Siraja, 2006.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Pertama Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, Beirut: Dar al 'Ilmi lil Malayain, tt.

Muslim Ibn al-hajjaj, *al-Musnad al-Shahi al-Mukhtasir*, Juz II Beirut: Dar Ihya al- Turas al-Arabi.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976

R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-41, PT Balai Pustaka, 2017.

Redaksi New Merah Putih. *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. New Merah Putih. Cetakan 1, 2009. Yogyakarta.

Republik Indonesia Undang-undang Perkawinan, Cetakan ke-I (Bandung: Focus Media, 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Tahir Mahood, *Personal Law In Islamic Countries*, New Delhy: Academy of Law and Religion, 1987.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Edisi Kedua, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)..

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Cetakan Kesembilan, Jakarta : Gemainsani, 2011.

B. Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Arkola, Surabaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

C. Jurnal

Achmd Asrori, Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4, Desember 2015, (Bandar Lampung: Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, 2015), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363> (29 Juni 2019).

D. Website

Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Online), Tersedia di:

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/kekerasan-perempuan-meningkat-71-persen-kasus-inses-terbanyak/full> (15 Juli 2019).

Undng-Undang Perkawinan Tanun 1974” (Online), tersedia di : http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm (5 Juni 2019).

Usia Perkawinan Ideal Menurut BKKBN (Online), Tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Kependudukan_dan_Keluarga_Berencana_Nasional, (9 Juli 2019).

Pengertian metode induktif dan metode deduktif” (online), tersedia di :
<https://makalah-update.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-metode.html>. (13 juli 2017 , pukul 12.15)



